
**MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE
GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19**

W Sitanggang, Maria Dyah A P, Maria Imakulta L N, M S Pandiangan, Maria Marsela B

*Prodi Perikanan Tangkap, Fakultas Vokasi, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
E-mail: sitanggangwanri@gmail.com*

ABSTRACT

Sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kualitas sumber daya perikanan yang kurang baik dapat mempengaruhi kegiatan perikanan tangkap. Kegiatan perikanan tangkap berperan strategis dalam proses pembangunan perikanan di Indonesia. Manajemen perikanan tangkap perlu dilakukan agar kondisi perikanan tangkap dapat berkembang, yang ditandai dengan peningkatan ketersediaan armada perikanan tangkap, kualitas nelayan, dan kualitas produk perikanan tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk analisis manajemen perikanan tangkap di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian fenomenologi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa manajemen perikanan tangkap yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan cara peningkatan dukungan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, dan peningkatan kualitas nelayan, pengorganisasian dilakukan dengan cara pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kualitas perikanan tangkap, pelaksanaan dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk perikanan tangkap di pasar domestik, serta pengawasan dilakukan dengan adanya pendataan informasi perikanan tangkap yang terintegrasi, serta pengujian produk perikanan tangkap. Kendala yang dihadapi dari proses perikanan tangkap yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki sedikit dan kemampuan dalam penggunaan alat tangkap terbatas.

Kata Kunci: *manajemen perikanan tangkap, perikanan, ketahanan pangan nasional*

1. PENDAHULUAN

Indonesia negara yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Kekayaan akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sumber pangan protein bagi masyarakat. Akan tetapi, data potensi perikanan tangkap di Indonesia disamping belum akurat juga tidak terdata secara maksimal. Perkembangan perikanan tangkap ditandai dengan peningkatan ketersediaan armada perikanan tangkap, kualitas nelayan, dan kualitas produk perikanan tangkap. Armada perikanan tangkap yang sudah ada perlu ditingkatkan dan dimodernisasi agar dapat meningkatkan kualitas produksi perikanan tangkap. Adanya peningkatan produksi perikanan tangkap diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta stabilitas harga pangan. Ketersediaan pangan yang cukup dapat menjamin stabilitas pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan (Susanto dkk., 2020). Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat harus dapat terpenuhi. Adanya kondisi pandemi Covid-19 membuat masyarakat khawatir dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi.

Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menurunkan kualitas konsumsi makanannya dengan cara membatasi pilihan makanan sumber protein hewani (Hestina dkk., 2020). Sektor perikanan tangkap dapat menjadi sumber tumpuan dalam penyediaan ikan sebagai sumber pangan protein yang dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional.

Kegiatan perikanan tangkap berperan strategis dalam proses pembangunan perikanan di Indonesia. Proses pembangunan perikanan tangkap ini masih banyak menghadapi kendala. Kendala yang dihadapi berupa terbatasnya armada dan alat tangkap, kemampuan para nelayan dalam penggunaan alat tangkap, sumber daya ikan yang semakin terbatas, dan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja sebagai nelayan. Oleh sebab itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam mendukung pembangunan perikanan tangkap di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis manajemen perikanan tangkap di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional di masa pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dilakukan untuk menangkap dan melihat berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu, para nelayan, dan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan dalam pembangunan perikanan tangkap untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional di masa pandemi Covid-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Manajemen Perikanan Tangkap dan Kendala yang dihadapi

Manajemen Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan Indonesia- Timor Leste guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional	
Perencanaan	1. Peningkatan dukungan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap 2. Peningkatan kualitas nelayan
Pengorganisasian	1. Dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah 2. Dinas kelautan dan perikanan Kab. Belu memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi ikan, pembinaan nelayan pesisir, dan melakukan pembinaan kelompok nelayan
Pelaksanaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk perikanan tangkap di pasar domestik
Pengawasan	1. Pendataan informasi perikanan tangkap yang terintegrasi 2. Penjaminan mutu kualitas produk perikanan dengan dilakukan

	pengujian produk perikanan
Kendala Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional	
1. Pembuatan surat ijin edar produk perikanan yang sulit dan mahal 2. Produk olahan perikanan yang masih sedikit 3. Jumlah sumber daya manusia yang berprofesi sebagai nelayan sedikit 4. Kemampuan nelayan dalam penggunaan alat tangkap sangat terbatas	

Pembahasan

Manajemen Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan Indonesia- Timor Leste guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Pelaksanaan manajemen perikanan tangkap dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan perikanan tangkap, pengorganisasian perikanan tangkap, pelaksanaan perikanan tangkap, dan pengawasan perikanan tangkap.

Perencanaan perikanan tangkap

Dalam menghadapi ketahanan pangan di Kab. Belu di era pandemi covid-19 Dinas Kelautan dan Perikanan menggenjot kegiatan perikanan tangkap dengan cara mendukung peralatan berupa alat tangkap, kapal, dan bantuan dana untuk pengembangan nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan alat tangkap, pelatihan perikanan paska tangkap, dan pengadaan koperasi perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belu juga membentuk kelompok untuk melakukan pengolahan dari hasil penangkapan produk perikanan. Produk perikanan dan hasil olahan perikanan dijual ke negara Timor Leste dan pasar rakyat Atambua. Produk-produk olahan perikanan tangkap dibuat oleh kelompok pengolahan yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belu.

Pengorganisasian perikanan tangkap

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belu memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan di daerah kewenangan di bidang ketersediaan ikan, konsumsi dan keamanan ikan. Dinas kelautan dan perikanan Kab. Belu memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi ikan.
2. Pembinaan nelayan pesisir
3. Melakukan pembinaan kelompok nelayan

Pengorganisasian ketahanan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah pada produksi perikanan tangkap dan konsumsi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan perikanan, dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Dinas kelautan dan perikanan terus mendorong para nelayan untuk memproduksi hasil perikanan tangkap. Dalam kondisi ini dinas kelautan dan perikanan terus memberikan sosialisasi terkait perikanan baik untuk memperbaiki sumber daya manusianya dan juga memberikan bantuan peralatan berupa alat tangkap serta kapal untuk masyarakat pesisir laut. Dinas kelautan dan perikanan juga memastikan ketersediaan ikan di Kab. Belu untuk mendorong dan memenuhi kebutuhan

masyarakat. Ketersediaan ikan di Kab. Belu masih sangat terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan ikan untuk masyarakat, dinas kelautan dan perikanan mendatangkan ikan dari luar pulau seperti dari Alor, Kupang, Buton, Bajo, Bima, Ambon dan beberapa daerah lainnya.

Pelaksanaan perikanan tangkap

Jumlah produk perikanan di Kab. Belu belum mampu memenuhi permintaan bahkan masih jauh dari cukup. Kondisi ini terlihat dari keadaan di pasar yang masih sepi penjual ikan. Padahal sumber daya perikanan yang terdapat di laut Kab. Belu masih sangat melimpah akan tetapi sumber daya manusianya yang berprofesi sebagai nelayan masih sangat sedikit. Masyarakat pesisir pelabuhan masih lebih banyak yang memilih untuk bekerja sebagai buruh pelabuhan dibandingkan menjadi nelayan dan banyak pula yang menjadikan profesi nelayan hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Dari hasil tangkapan masyarakat menjual kepada pengepul yang dengan sesuka hati menentukan harga dari nelayan. Hal tersebut juga yang mengakibatkan kesejahteraan nelayan masih rendah dan mengakibatkan banyak nelayan yang beralih profesi. Akan tetapi disisi lain harga ikan di pasar masih terjangkau dan murah. Produk olahan perikanan di Kab. Belu juga sangat susah ditemukan karena masyarakat menganggap produk olahan perikanan tersebut sangat susah dilakukan dan juga perijinan untuk menjual hasil produksi ini susah untuk didapatkan. Oleh sebab itu, masyarakat jarang membuat produk olahan perikanan dan hanya diolah menjadi makanan di rumah saja sebagai lauk pauk.

Pengawasan perikanan tangkap

Dalam menjaga kualitas hasil tangkapan di Kab. Belu, dinas kelautan dan perikanan melakukan pengawasan yang cukup ketat, dimana setiap ikan dan produksi olahan ikan yang masuk selalu dilakukan uji klinis. Ikan yang masuk akan dicek apakah terdapat kandungan formalin atau tidak dan apabila ditemukan kandungan formalin pada ikan dan produk olahan perikanan maka dinas kelautan dan perikanan tidak akan memberikan ijin masuk pemasaran di Kab. Belu.

Kendala Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan Indonesia- Timor Leste guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Dalam proses perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan masih banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari ketersediaan penunjang kegiatan penangkapan ikan yang masih terbatas dan kemampuan yang dimiliki juga masih sangat minim. Hal tersebut terlihat dari kondisi para nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional. Dengan keterbatasan pengetahuan dan terbatasnya alat penangkapan yang mereka miliki mengakibatkan jumlah ikan yang diperoleh juga terbatas dan ikan yang didapatkan juga hanya ikan dengan ukuran yang standar saja. Selain itu, masyarakat juga lebih memilih untuk menjadi buruh pelabuhan daripada menjadi nelayan karena penghasilan yang didapatkan lebih pasti.

Faktor dari rendahnya pengolahan dan pemasaran produk olahan ikan diakibatkan karena kesulitan masyarakat dalam mendapatkan surat ijin layak edar produk perikanan dan harganya yang

mahal. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk mengolah hanya sebatas sebagai makanan lauk pauk saja. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Belu sangat tinggi dan masih menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang dijadikan sebagai lauk pauk.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen perikanan tangkap yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan cara peningkatan dukungan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap dan peningkatan kualitas nelayan, pengorganisasian dilakukan dengan cara pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kualitas perikanan tangkap, pelaksanaan dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk perikanan tangkap di pasar domestik, serta pengawasan dilakukan dengan adanya pendataan informasi perikanan tangkap yang terintegrasi, serta pengujian produk perikanan tangkap.
2. Kendala yang dihadapi dari proses perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki sedikit dan kemampuan dalam penggunaan alat tangkap terbatas, serta surat ijin layak edar produk perikanan yang sulit didapatkan dan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hestina, J., Purba, H. J., & Dermoredjo, S. K. 2020. Pencapaian ketahanan pangan dan gizi pada masa pandemi covid-19. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/21-BBRC-2020-III-3-4-JHT.pdf>
- Susanto, A., Hamzah, A., Imawati, R., Nurdin, H. S., & Supadminingsih, F. N. 2020. Peran sektor perikanan tangkap dalam mendukung ketahanan pangan perikanan di Provinsi Banten. *Journal of Local Food Security* 1(1), 9-17.